

SEJARAH BERDIRINYA DINAS PUPR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Mamuju Tengah terbentuk seiring dengan sahnya pemekaran daerah tersebut dari Kabupaten Induk, yaitu Kabupaten Mamuju, pada 14 Desember 2012.

Berikut adalah ringkasan sejarah dan perkembangannya:

- **Pemekaran Wilayah (2012):** Kabupaten Mamuju Tengah disahkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui sidang paripurna DPR RI. Pemekaran ini dilatarbelakangi oleh rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang terlalu jauh dari ibu kota kabupaten induk.
- **Pembentukan Instansi Teknis:** Setelah terbentuknya struktur pemerintahan daerah baru di bawah kepemimpinan bupati, dibentuklah perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mamuju Tengah, untuk mengelola infrastruktur dasar, jalan, dan sumber daya air.
- **Perkembangan Infrastruktur:** Dinas PUPR Mamuju Tengah terus bersinergi dengan [Kementerian Pekerjaan Umum](#) dalam mengusulkan dan menangani berbagai proyek strategis, termasuk peningkatan konektivitas jalan daerah serta sistem irigasi. Wilayah ini juga menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan Bendungan Budong-Budong.



VISI MISI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MAMUJU TENGAH



VISI

Terwujudnya sarana dan prasarana ke PU-AN yang berhasil guna serta berwawasan lingkungan menuju masyarakat Mamuju Tengah yang mandiri

MISI

1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur wilayah secara terintegrasi dan berkelanjutan
2. Mengembangkan prasarana dan sarana ke PU-AN yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkeadilan
3. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat



Ir. USMAN, S.T., M.M

Kepala Dinas

About Me

Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, saya bertekad mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan. Berlandaskan integritas, profesionalisme, inovasi, dan sinergi, saya terus meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah.

Education

SEKOLAH DASAR	1990
SD NEGERI 048 INPRES MATAKALI	
SMP	1993
SMP NEGERI 3 POLEWALI	
SMA	1996
SMA NEGERI WONOMULYO	
S-1/Sarjana	2022
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA	
S-2	2020
STIE AMKOP MAKASSAR	

Skills

- STRATEGIC LEADERSHIP
- INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
- PROJECT MANAGEMENT
- PUBLIC ADMINISTRATION
- STAKEHOLDER MANAGEMENT
- CRITICAL THINKING

Contact

- +62 813-6204-9491
- usmangogo1977@gmail.com
- Ir. Usman, S.T., M.M
- DUSUN NGAPABOA, KECAMATAN TOPOYO, KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Experience Work

- **Kepala Dinas**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (2026 - SEKARANG)
- **Sekretaris**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (2025 - 2026)
- **Kepala Bagian**
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (2024 - 2025)
- **Sekretaris**
SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (2023 - 2024)
- **Kepala Bagian**
KEPALA BAGIAN BINA PROGRAM (2018 - 2023)
- **Kepala Bidang**
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN (2017 - 2018)
- **Kepala Seksi**
SEKSI PEMUKIMAN DAN PERUMAHAN RAKYAT (2014- 2017)
- **Staf**
DINAS PEKERJAAN UMUM, KEBERSIHAN DAN TATA RUANG (2013- 2014)

Training

SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III/PKA	Diklat Struktural
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA KEPALA	2017
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN	
PELATIHAN APARATUR II	

Sertifikasi

Ahli Pengadaan Nasional	Sertifikasi
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	
PEMERINTAH	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan memperhatikan petunjuk pedoman teknis dari Menteri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang prasarana dan sarana / infrastruktur ke PU-an, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan berbagai upaya yang tertuang dalam visi dan misi agar semuanya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang ke PU-an di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tammauni Pue Ballung Kec.Tobadak Kab.Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Laman: www.dinaspupr.mamutengahkab.go.id, Email: dinaspupr.mateng@gmail.com

Sesuai dengan peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah (pada Bagian Keempat, Paragraf 1, Pasal 122), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian, sebagaimana tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah juga menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju Tengah terdiri atas :

1. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Tugas : melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata perundangan, pengelolaan barang milik daerah, dan kerumahtanggaan kantor.
 - Fungsi :
 - penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tammauni Pue Ballung Kec.Tobadak Kab.Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Laman: www.dinaspupr.mamutengahkab.go.id, Email: dinaspupr.mateng@gmail.com

- penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- penyelenggaraan administrasi keuangan;
- penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat kerja terkait;
- penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat daerah terkait; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :

- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
Tugas : mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan, penyediaan data dan informasi publik Satuan Kerja; dan
- Subbagian Tata Usaha
Tugas : mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.



2. Bidang Sumber Daya Air;

- Tugas : melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rayat konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten.
- Fungsi :
 - Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Bidang Bina Marga;

- Tugas : melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
- Fungsi :
 - Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
 - Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Cipta Karya;

- Tugas : melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem



drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

▪ Fungsi :

- Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
- Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Bina Konstruksi;

- Tugas : melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Tammauni Pue Ballung Kec.Tobadak Kab.Mamuju Tengah Sulawesi Barat
Laman: www.dinaspupr.mamutengahkab.go.id, Email: dinaspupr.mateng@gmail.com

▪ Fungsi :

- Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
- Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Bina Konstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan



6. Bidang Tata Ruang.

- Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- Fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Tata Ruang juga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.